

Azyumardi Azra : Pembaruan Pemikiran Dan Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia

Wahyuddin Noor¹

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Info Artikel :

Diterima : 12 Maret 2018
Direvisi : 25 Maret 2018
Dipublish : 15 April 2018

Abstrak

Sebagai cendekiawan, Azyumardi Azra merupakan satu dari banyak tokoh pembaru pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam, menurut Azra, perlu mengembangkan strategi pendekatan ganda dengan tujuan untuk memadukan pendekatan-pendekatan situasional jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang. Perubahan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan pemikiran dan kelembagaan. Perubahan pemikiran dan kelembagaan tersebut merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern. Pembaruan pemikiran pendidikan Islam Azyumardi Azra, meliputi: a). Modernisasi pendidikan Islam; b). Demokratisasi pendidikan Islam. Di bidang kelembagaan, Azra pun dikenal aktivis atau praktisi pembaru kelembagaan pendidikan Islam. Pada masa kepemimpinannya, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami perubahan status menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sungguh sebuah prestasi yang belum pernah dicapai pada zaman sebelumnya.

Kata Kunci :

Pembaruan
Pemikiran dan Kelembagaan
Pendidikan Islam

Keyword:

Renewal
Thinking and institutional
Islamic Studies

ABSTRACT

As a scholar, Azyumardi Azra is one of the many reformers of Islamic education in Indonesia. Islamic education, according to Azra, needs to develop a dual approach strategy with the aim of integrating short-term situational approaches with a long-term conceptual approach. Changes in Islamic education can be done by changing thinking and institutions. This change of thought and institutions is a prerequisite for the rise of the Muslims in modern times. Renewal of Islamic education thought Azyumardi Azra, including: a). Modernization of Islamic education; b). Democratization of Islamic education. In the field of institutionalism, Azra was also known as an activist or practitioner of reforming Islamic education institutions. During his leadership, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta experienced a change in status to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, truly an achievement that had never been achieved in the previous era.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Koresponden :

Author Wahyuddin Noor,
Email: wahyuddinoor@gmail.com

Pendahuluan

Azyumardi Azra adalah seorang akademisi berprestasi, pemikir Islam progresif (Dwifatma, 2011), dan satu dari salah seorang cendekiawan muslim “pendobrak” dan pembaru. Kiprahnya selama ini di dunia pendidikan Islam menghasilkan inovasi-inovasi yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Salah satu hasilnya adalah, transformasi IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah, yang menjadikan institusi pendidikan Islam bisa masuk ke dalam arus utama, menjadi lebih open-minded, berkualitas dan bermartabat di mata masyarakat.

Meskipun harus pula diakui, realita saat ini, pendidikan Islam secara umum pada tataran implementatif, hingga kini masih berada dalam posisi problematik. Di satu sisi, pendidikan Islam belum sepenuhnya bisa keluar dari idealisasi kejayaan pemikiran dan peradaban Islam masa lampau yang hegemonik; sementara di sisi lain, pendidikan Islam juga “dipaksa” untuk menerima tuntutan-tuntutan masa kini, khususnya yang datang dari Barat, dengan orientasi yang lebih praktis (Arif, 2008). Sehingga, pendidikan Islam kelihatan masih terlambat merumuskan diri merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat sekarang dan masa mendatang (Azra, 1999b). Kenyataan tersebut acapkali menimbulkan dualisme dan polarisasi sistem pendidikan.

Kondisi sebagaimana di atas, menurut Azyumardi Azra setidaknya perlu dicarikan solusi. Menurutnya, pendidikan Islam perlu mengembangkan strategi pendekatan ganda dengan tujuan untuk memadukan pendekatan-pendekatan situasional jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang. Sebab, pendidikan Islam adalah suatu usaha mempersiapkan muslim agar dapat menghadapi dan menjawab

tuntutan kehidupan dan perkembangan zaman secara manusiawi. Karena itu, hubungan usaha pendidikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah merupakan hubungan yang parsial dan bukan hubungan yang insidental dan tidak menyeluruh (Azra, 1999a). Di sini, menurut Karel A. Steenbrink seperti dikutip Jalaluddin, letak pentingnya upaya melakukan perubahan pendidikan Islam berdasarkan pada kebutuhan zaman (Jalaluddin, 2003).

Di samping itu, pendidikan Islam, menurut Azyumardi Azra, sejatinya memang harus melakukan perubahan secara signifikan. Untuk mencapai perubahan pendidikan Islam itu, setidaknya dilakukan dengan cara melakukan perubahan pemikiran dan kelembagaan. Perubahan pemikiran dan kelembagaan tersebut merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern (Azra, 1999b). Karena itu pemikiran dan kelembagaan pendidikan Islam seyogyanya pun diperbarui sesuai dengan kerangka modernitas.

Modernisasi pendidikan Islam merupakan keniscayaan sejarah yang penuh perubahan. Dilihat dari perspektif perubahan dan perkembangan kebudayaan, pemikiran dan kelembagaan pendidikan tradisional Islam sulit untuk survive tanpa modernisasi (Azra & Thaha, 2012). Dan Azra pun beranggapan, mempertahankan pemikiran dan kelembagaan Islam tradisional hanya akan memperpanjang nestapa ketidakberdayaan kaum muslim dalam berhadapan dengan kemajuan dunia modern. Itu artinya, bahwa pendidikan Islam harus dapat memberikan disiplin ilmu yang dapat membantu para lulusannya untuk dapat hidup di masyarakat secara layak dan bermartabat.

Selain itu, Azra pun berpandangan bahwa, hubungan antara modernisasi dan pendidikan, pada satu segi, pendidikan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang merupakan prasyarat dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan modernisasi. Tetapi pada segi lain, pendidikan sering dianggap sebagai objek modernisasi. Dalam konteks ini, pendidikan negara-negara yang tengah menjalankan program modernisasi pada umumnya dipandang masih terbelakang dalam berbagai hal, dan karena itu, sulit diharapkan bisa memenuhi dan mendukung program modernisasi. Untuk itu, pendidikan harus diperbarui atau dimodernisasi - baik modernisasi dalam pemikiran maupun kelembagaan - sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikul pada masyarakat modern, yakni fungsi sosialisasi, penyekolahan dan pendidikan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah pemikiran Azyumardi Azra yang berkaitan dengan pembaruan pemikiran dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia. Adapun sistematika tulisan diawali dengan biografi singkat Azyumardi Azra, dilanjutkan dengan kondisi pendidikan Islam di Indonesia, kemudian pembaruan pemikiran dan kelembagaan pendidikan Islam yang telah digagas dan dipraktikkan Azyumardi Azra.

Pembahasan

1. Biografi Singkat Azyumardi Azra

Azyumardi Azra lahir di Lubuk Alung, sebuah daerah kecil di Sumatera Barat, pada tanggal 04 Maret 1955 (Dwifatma, 2011). Menikah dengan Ipah Fariyah, dikaruniai 4 anak: Raushanfiki Usada, Firman El-Amny Azra, Muhammad Subhan Azra, dan Emily Sakina Azra. Pendidikan yang ditempuhnya meliputi Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada tahun 1982, Master of Art (M.A.) pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University tahun 1998, Master of Philosophy (M.Phil.) pada Departemen Sejarah, Columbia University tahun 1990, dan Doctor of Philosophy Degree tahun 1992, dengan disertasi berjudul *The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia : Network of Middle Eastern and Malay-Indonesian 'Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Tahun 2004 disertasi yang sudah direvisi diterbitkan secara simultan di Canberra (Allen Unwin dan AAAS), Honolulu (Hawaii University Press), dan Leiden, Negeri Belanda (KITLV Press).

Pada awalnya sesungguhnya Azyumardi tidaklah berobsesi atau bercita-cita menggeluti studi keIslaman. Sebab, Dia lebih berniat memasuki bidang pendidikan umum di IKIP. Adalah desakan ayahnya, yang menyuruh Azyumardi masuk ke IAIN sehingga dia kini di kenal sebagai tokoh intelektual Islam Indonesia. Dia lahir dari ayah Azikar dan Ibu Ramlah. Azyumardi Azra kini dikenal sebagai Profesor yang ahli sejarah, sosial dan intelektual Islam dan tak kurang telah menulis 18 buku tentang Islam. Koleksi bukunya sudah mencapai sekitar 15.000 judul buku.

Di tahun 2001, Azyumardi Azra memperoleh kepercayaan sebagai Profesor Tamu Internasional pada Departemen Studi Timur Tengah, New York University (NYU). Sebagai dosen dia antara lain memberi ceramah dan kuliah pada NYU, Harvard University (di Asia Centre), serta pada Columbia University. Dia juga dipercaya menjadi pembimbing sekaligus penguji asing untuk tesis dan disertasi di University Malaya, University Kebangsaan Malaysia, University of Leiden, University of Melbourne, Australian National University, dan lain-lain.

Selain menulis beliau juga aktif mempresentasikan makalah pada berbagai seminar dan workshop nasional maupun internasional. Pria yang pernah tercatat sebagai wartawan "Panji Masyarakat" di tahun 1979-1985 ini telah menulis dan menerbitkan buku antara lain berjudul *Jaringan Ulama* (tahun 1994),

Pergolakan Politik Islam (1996), Islam Reformis (1999), Konteks Berteologi di Indonesia (1999), Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (1999), Esei-Esei Pendidikan Islam, dan Cendekiawan Muslim (1999), Renaisans Islam di Asia Tenggara (buku yang memenangkan penghargaan nasional sebagai buku terbaik untuk kategori ilmu-ilmu sosial dan humaniora di tahun 1999, Islam Substantif (2000), Historiografi Islam Kontemporer (2002), Paradigma Baru Pendidikan Nasional (2002), Reposisi Hubungan Agama dan Negara (2002), Menggapai Solidaritas (2002), Konflik Baru Antar Peradaban, Islam Nusantara; Jaringan Global dan Lokal, dan Surau; Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi dan Modernisasi (2003); Shari'a and Politics (2004). Pada tahun 2002, ia memperoleh award sebagai Penulis Paling Produktif dari Penerbit Mizan (Nata & Nasuhi, 2002).

2. Kondisi Pendidikan Islam di Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, secara historis terkait dengan aktivitas dan praktek penyebaran agama Islam. Pendidikan Islam selama ini berperan sebagai mediator, di mana ajaran Islam dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan. Melalui pendidikan inilah, masyarakat muslim Indonesia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW (H Abuddin Nata, 2012).

Namun dalam perjalanannya, pendidikan Islam seringkali berhadapan dengan berbagai problematika yang tidak ringan, seperti komponen-komponen pendidikan (Sudirman, n.d.) yang berjalan apa adanya, alami dan tradisional dan tanpa perencanaan konsep yang matang. Tujuan pendidikan Islam, misalnya, seringkali hanya diarahkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang hanya menguasai ilmu Islam an sich, taat beribadah dan gemar beribadah untuk tujuan akhirat. Akibatnya, lulusan pendidikan Islam hanya memiliki kesempatan dan peluang yang terbatas, yaitu hanya sebatas pengawal moral bangsa, dan tidak mampu merebut peluang dan kesempatan lapangan kerja yang tersedia.

Selain itu, secara metodologi, pendidikan Islam dalam praktik pembelajarannya pun selama ini hanya terpaku pada aspek kognitif semata dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volitif. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara gnosis dan praxis (Muhaimin, 2005). Bahkan Atho Mudzhar mengemukakan hasil studi Litbang Agama dan Diklat Keagamaan tahun 2000, bahwa kemerosotan moral dan akhlak peserta didik disebabkan salah satunya, akibat kurikulum pendidikan agama yang terlalu padat materi, dan materi tersebut lebih banyak mengedepankan aspek pemikiran ketimbang membangun kesadaran peserta didik atas keberagaman yang utuh(Sudirman, n.d.).

Persoalan di atas diperparah dengan tidak memadainya tenaga pendidik Islam yang profesional, yaitu tenaga pendidik yang selain menguasai materi ilmu secara baik dan benar, juga didukung oleh idealisme dalam mendidik. Para pendidik Islam, secara umum belum dapat dikatakan profesional. Ini diakibatkan oleh adanya sumber daya pendidik yang rata-rata di bawah kategori bibit unggul, serta lebih didasarkan pada motivasi keagamaan, dan bukan kompetensi profesional (Nata & Nasuhi, 2002).

Dari aspek kelembagaan, tampaknya kita pun tidak bisa terlalu optimis –bahkan bisa jadi pesimis. Para pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia sedang dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Umumnya lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki skor akreditasi yang rendah. Masih banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang belum dikelola secara profesional dan di satu sisi, hanya menjadi lahan mencari nafkah bagi suatu keluarga atau kelompok tertentu; menjadi tempat penampungan para sarjana yang belum mendapat pekerjaan tetap; dan menjadi lahan seseran bagi tenaga-tenaga nyambi (part timer) (Sirozi, 2004). Akibatnya, sebagian besar lembaga pendidikan Islam di negeri ini masih terseok-seok, 'hidup segan mati tak mau', sehingga sulit dibedakan apakah lembaga-lembaga tersebut ada atau tidak ada.

Pada sisi yang lain, kebanyakan lembaga pendidikan Islam juga masih dikelola dengan semangat "keikhlasan", sehingga tidak terjadi esensial dalam pendidikan Islam. Tanpa harus mengorbankan semangat keikhlasan dan jiwa pengabdian, sudah waktunya sistem dan lembaga pendidikan Islam dikelola secara profesional, bukan hanya dalam soal penggajian, pemberian honor, tunjangan atau pengelolaan administrasi dan keuangan. Profesionalisme mutlak pula diwujudkan dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan itu sendiri.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, setidaknya telah memberikan gambaran bahwa, pendidikan Islam, secara konseptual dan aplikatif, masih menyisakan berbagai persoalan. Meski tetap dalam batas-batas pemakluman, karena agenda pembaruan pendidikan sesungguhnya tidak akan pernah berhenti dan selesai, seiring permasalahan yang seringkali muncul. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, selesai memecahkan masalah, muncul masalah lain yang kadang tidak kalah rumitnya (Suyanto, 2000). Namun yang pasti, upaya-upaya untuk mengatasi persoalan tetap harus diikhtikarkan, sehingga pendidikan dapat hidup berdampingan secara harmonis bersama dengan tuntutan zaman. Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan munculnya para pemikir dan pembaru pendidikan, termasuk Azyumardi

Azra, tokoh pendidikan nasional yang menggagas konsep pembaruan atau modernisasi pendidikan Islam di Indonesia.

Pembaruan (Indonesia, 1990) atau modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, dalam pandangan Azyumardi Azra, sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisme Islam di kawasan ini. Gagasan modernisasi Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad 20, pada lapangan pendidikan direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang hampir secara menyeluruh mengadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda (Azra & Thaha, 2012).

3. Pembaruan Pendidikan Islam Azyumardi Azra

Pembaruan pendidikan Islam, menurut Jusuf Amir Faisal, merupakan suatu usaha multidimensional yang kompleks, dan tidak hanya bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dirasakan, tetapi, terutama merupakan suatu usaha penelaahan kembali atas aspek-aspek sistem pendidikan yang berorientasi pada rumusan tujuan yang baru”, dan selalu berorientasi pada perubahan masyarakat (Faisal & Jusuf, 1995).

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut hemat penulis, pembaruan pendidikan Islam yang digagas Azyumardi Azra meliputi dua hal: pertama, pembaruan pemikiran pendidikan Islam, dan kedua, pembaruan kelembagaan pendidikan Islam. Pembagian ini didasari, setidaknya bahwa Azyumardi Azra merupakan cendekiawan, pemikir dan intelektual yang bergumul dengan realitas birokrasi kelembagaan, yang tidak bisa ditangani dengan konsep dan wacana serba abstrak, teoritis dan rumit. Azyumardi juga lebih dipandang sebagai ‘intelektual organik’ yakni pemikir yang revolusioner dan kritis serta mendedikasikan diri untuk perubahan terus menerus demi kebaikan masyarakat.

a. Pembaruan Pemikiran Pendidikan Islam

1) Modernisasi Pendidikan Islam

Azyumardi Azra menyebutkan, bahwa beberapa gagasan dan program modernisasi pendidikan Islam mempunyai akarnya dalam gagasan dan program modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Baginya, modernisasi pemikiran dan kelembagaan merupakan prasyarat kebangkitan dari kaum muslimin di masa modern. Karena itu, pemikiran dan kelembagaan Islam, termasuk pendidikan sejatinya haruslah dimodernisasi dan diperbarui sesuai dengan kerangka modernitas (Azra & Thaha, 2012). Dengan mendasarkan pada bidang keahlian sejarah, Azyumardi mengajukan saran-saran upaya modernisasi pendidikan Islam tersebut antara lain melalui pengembangan kajian Islam sebagai disiplin keilmuan universitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembentukan sekolah-sekolah yang unggul.

Namun demikian, modernisasi pendidikan Islam yang digagas Azra adalah modernisasi yang didasarkan pada ajaran Islam yang pada prinsipnya sangat modern, yaitu bagaimana suatu pengetahuan bukan hanya untuk diketahui dan dikembangkan, melainkan sekaligus untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Pengamalan ilmu pengetahuan model ini sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Tuhan dan masyarakat manusia dan menjadi karakteristik pendidikan Islam.

Dengan demikian, Azra menekankan perlunya dilakukan modernisasi pada segenap aspek kehidupan masyarakat muslim, terlebih salah satunya terkait dengan konsep pemikiran yang merupakan landasan bagi segenap aktivitas dan ide-ide. Kerangka berpikir selayaknya mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Diperlukan pemikiran yang terbuka dengan wawasan yang luas dan adaptif agar mampu menyeleksi trend dan perkembangan gaya hidup. Dengan pemikiran serta wawasan yang terbuka juga mampu menyaring perkembangan dan kemajuan teknologi yang relevan sebagai bentuk pelayanan terhadap publik.

Pemikiran pendidikan Islam lain yang sempat diteropong Azyumardi, adalah tentang tujuan pendidikan Islam. Menurut Azra, tujuan pendidikan Islam ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam, tetapi seperti pendidikan umum lainnya, tentunya pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang lebih operasional sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan lebih jauh. Tujuan pendidikan Islam yang dimaksud adalah tujuan pertama-tama yang hendak dicapai dalam proses pendidikan itu. Tujuan itu merupakan “tujuan antara” dalam mencapai “tujuan akhir” yang lebih jauh. Tujuan antara itu, menyangkut perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi anak didik, masyarakat maupun lingkungan tempat hidupnya (Azra, 1999a), atau dapat juga dikatakan tujuan individual, sosial dan profesional (Basri, 2013). Dengan demikian, pendidikan Islam dalam pandangan Azra, sejatinya tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.

Adagium setali tiga uang dengan tujuan pendidikan Islam, kurikulum (Mahmud & Priatna, 2005) pendidikan Islam pun mendapat sorotan Azyumardi Azra terkait pembaruan pemikirannya. Menurutnya, kurikulum pendidikan Islam jelas selain mesti berorientasi pada pembinaan dan pengembangan nilai agama dalam diri peserta didik, kini harus pula memberikan penekanan khusus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan cara ini, pendidikan Islam bisa fungsional dalam menyiapkan dan membina sumber daya manusia seutuhnya, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkeimanan dalam mengamalkan agama. Hanya dengan cara ini pula, secara sistematis dan programatis dapat melakukan pengentasan kemiskinan secara bertahap namun pasti (Azra & Thaha, 2012). Itu artinya, kurikulum pendidikan Islam perlu melakukan pengembangan (Azra & Thaha, 2012), sehingga menghasilkan kurikulum yang kolaboratif, akomodatif dan berkarakteristik ideal-operasional (Gunawan, 2014).

Selain pembaruan pemikiran di atas, gagasan pembaruan pendidikan Islam lainnya yang dikemukakan Azyumardi Azra, juga terkait dengan pemikiran pembaruan pendidikan pesantren (Prasojo, 1974), dan surau (Azra & Thaha, 2012). Dalam konteks pesantren yang ada di Indonesia, Azra mencoba menganalisis tentang sebab-sebab mengapa pesantren dapat terus bertahan dalam menghadapi modernisasi. Hal ini karena, menurut Azra, pesantren mampu merespon perkembangan yang terjadi di sekitarnya tanpa meninggalkan ciri aslinya, seperti mendirikan madrasah di kompleks pesantren, bahkan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada di bawah sistem Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan departemen-departemen lain yang terkait dengan lembaga yang didirikan di pesantren. Tetapi, sekali lagi, pembaruan pendidikan pesantren, tampaknya sudah menjadi keharusan sejarah. Dan, modernisasi ini akhirnya dikukuhkan dengan Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang mengakui sistem pendidikan Islam, termasuk pesantren.

Selanjutnya mengenai surau, Azra mengatakan bahwa surau dengan sistem pendidikannya yang khas kembali mencapai puncak kejayaannya setidaknya hingga dasawarsa kedua abad ke-20, ketika pendidikan sekular Belanda dan madrasah diperkenalkan kelompok muslim modernis. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pendidikan surau tetap memainkan peran penting bagi masyarakat Minangkabau sepanjang abad ke-19. Namun dalam masa kemerdekaan, hanya beberapa surau saja yang bertahan, bahkan di masa-masa lebih akhir sebagiannya mulai menamakan diri sebagai "pesantren". Sedangkan surau sendiri kemudian lebih sekadar tempat belajar membaca al-Qur'an atau arena sosialisasi anak-anak dan remaja.

2) Demokratisasi Pendidikan Islam

Menurut Azyumardi Azra, demokratisasi adalah proses menuju demokrasi. Sedangkan demokratisasi pendidikan, adalah proses menuju demokrasi di bidang pendidikan. Artinya, demokratisasi pendidikan Islam dalam perspektif Azra, sama halnya dengan proses menuju demokrasi di dalam pendidikan Islam (Istanto, 2009). Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana strategis bagi penciptaan demokrasi. Dan cara paling strategis "mengalami demokrasi" (*experiencing democracy*) adalah melalui apa yang disebut sebagai *democracy education*. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Selanjutnya Azra menegaskan bahwa, dalam banyak hal, pendidikan demokrasi identik dengan "pendidikan kewargaan" (*civic education*), meskipun pendidikan kewargaan lebih luas cakupannya daripada pendidikan demokrasi. Namun yang jelas, keduanya berupaya menumbuhkan *civic culture* dan *civility* di lingkungan pendidikan, yang pada gilirannya akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan demokrasi yang baik dan otentik pada Negara-bangsa Indonesia. Sejalan dengan pendapat Azra, Syafi'i Maarif mengemukakan bahwa proses penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi kiranya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam kaitan ini, perwujudan sistem pendidikan yang demokrasi merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan.

Demokratisasi pendidikan merupakan salah satu gagasan kunci dalam wacana pendidikan kritis, selain itu, ia juga sebagai prasyarat penting bagi pertumbuhan sistem politik demokrasi. Pasalnya, melalui proses inilah diharapkan nantinya dapat muncul manusia-manusia yang berwatak demokratis, berjiwa merdeka, berpikir kritis, berakhlak dan sangat toleran dengan pandangan dan praktik demokratis. Sehingga akan tumbuh *civil society* di lingkungan pendidikan.

Menurut Azra, demokratisasi pendidikan Islam bertujuan akhir pembentukan masyarakat Indonesia yang demokrasi, bersih, kritis, bermoral, dan berakhlak serta berpegang teguh pada

nilai keadaban. Selain itu, Azra juga mengemukakan beberapa ciri demokratisasi pendidikan Islam, yaitu:

- a). Adanya kurikulum yang dinamis dan memberikan ruang bagi terwujudnya kreatifitas peserta didik, mempunyai semangat untuk melakukan perubahan sosial.
- b). Perubahan paradigma pendidikan Islam, merubah paradigma dari otoriter ke demokratis, tertutup ke keterbukaan, doktiner ke partisipatoris.
- c). Adanya sinkronisasi antara lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan lingkungan masyarakat, di mana pendidikan yang berorientasi pembebasan dapat tercapai.

Dengan demikian, Pendidikan Islam, bukan hanya sekadar proses penanaman nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari ekses negatif globalisasi. Tetapi yang paling urgen adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan pendidikan Islam tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas (liberating force) dari himpitan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi (Rahmat, 1986).

b. Pembaruan Kelembagaan Pendidikan Islam

Pembaruan kelembagaan pendidikan Islam Azyumardi Azra dapat ditelusuri dari kebijakan yang diambilnya selama ia menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, meliputi:

- 1) Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Terjadinya IAIN menjadi UIN tersebut dilakukan oleh serangkaian kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh para pejabat UIN setahap demi setahap. Dalam kaitan ini paling kurang ada tiga tahap yang memengaruhi terjadinya perubahan tersebut. Pertama, tahap perintisan dan penjajagan yang dilakukan di zaman Harun Nasution sebagai rektor. Sebagai seorang yang berpikiran modern dan rasional, Harun Nasution melihat bahwa IAIN yang ada sekarang sudah tidak cocok lagi dengan kebutuhan zaman. Sejak berdirinya IAIN sebagai ADIA di tahun 1957 hingga tahun 1980-an sudah perubahan banyak terjadi baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, pola kerja, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut menuntut adanya manusia-manusia yang berbeda dengan manusia-manusia pada masyarakat agraris. Sekarang manusia hidup di era industrialisasi yang serba modern. Era ini membutuhkan manusia selain yang memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, juga harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan berwawasan modern seperti inovatif, kreatif, progresif, demokratis, ulet, kerja keras, menghargai waktu, berpandangan jauh ke depan dan dinamis. Jika IAIN ingin tetap eksis dan dibutuhkan zaman, maka ia harus mengadakan penyesuaian dengan berubah menjadi universitas. Untuk lebih memantapkan gagasan ini, di zaman Harun Nasution dilakukan serangkaian penelitian, seminar, studi banding ke berbagai negara, dan sebagainya untuk mendapat masukan.

Kedua, tahap pelanjutan dan pematangan konsep. Tahap ini terjadi pada zaman Quraish Shihab sebagai rektor. Setelah Harun Nasution tidak menjabat sebagai rektor, gagasan untuk melakukan perubahan IAIN menjadi UIN mengalami kevakuman beberapa saat. Di zaman Quraish Shihab upaya melakukan perubahan IAIN menjadi UIN tersebut dilanjutkan kembali. Upaya ini dilakukan dengan cara menyusun proposal perubahan IAIN menjadi UIN yang lengkap dan komprehensif di bawah koordinasi Azyumardi Azra, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik. Di dalam proposal tersebut dikemukakan alasan-alasan yang mendasari perubahan tersebut secara lengkap dan meyakinkan, penambahan fakultas serta berbagai perangkat dan sarana prasarana yang dibutuhkan, termasuk aspek anggaran yang dibutuhkan. Di antara alasan yang mendasari perubahan IAIN menjadi UIN adalah a). Untuk memberikan peluang mendapatkan pendidikan tinggi yang lebih luas kepada para tamatan madrasah. Hal ini terjadi, karena dengan berubahnya IAIN menjadi UIN akan bertambah fakultas dan program studi yang berdampak pada penambahan jumlah mahasiswa yang dapat diterima; b). Agar tamatan UIN dapat memasuki dunia lapangan yang lebih luas. Hal ini terjadi, karena dengan dibukanya fakultas-fakultas umum di samping fakultas-fakultas agama yang telah ada, tamatan UIN tidak hanya dapat bekerja di lembaga-lembaga keagamaan seperti Departemen Agama (saat ini Kementerian Agama), madrasah dan pesantren, melainkan juga dapat bekerja di berbagai sektor yang lebih luas seperti di perbankan, perusahaan-perusahaan industri dan jasa, serta berbagai kegiatan lainnya; c). Agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menampung tamatan Madrasah Aliyah yang keadaannya sudah berubah menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) yang bercorak keagamaan. Diketahui bahwa sejak tahun 1994 telah terjadi perubahan pada kurikulum Aliyah dari yang semula sebagai kurikulum untuk sekolah menengah keagamaan menjadi kurikulum SMU yang bercorak keagamaan. Dengan demikian, lulusan Madrasah Aliyah

sudah tidak lagi sama dengan lulusan Madrasah Aliyah pada tahun-tahun sebelumnya. Jika lulusan Madrasah Aliyah sebelumnya yang bercorak agama sangat cocok untuk masuk ke IAIN, maka setelah terjadinya perubahan kurikulum tersebut, tamatan Aliyah sudah tidak lagi cocok masuk IAIN. Hal yang demikian mengharuskan IAIN berubah menjadi UIN sehingga lebih cocok untuk menampung tamatan madrasah yang telah berubah tersebut; d). Untuk meningkatkan martabat perguruan tinggi Islam yang berada di bawah Departemen Agama sehingga sejajar dengan martabat perguruan umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, dan jika dimungkinkan lebih tinggi lagi martabatnya. Hal yang demikian perlu dilakukan, mengingat IAIN yang ada sekarang masih sering diposisikan sebagai perguruan tinggi kelas dua dan dimarjinalkan atau dilihat sebelah mata. Mereka yang kuliah di ITB misalnya, melihat bahwa masuk IAIN tidak sesulit masuk perguruan tinggi bergengsi seperti UGM, ITB, UI dan lain-lain. Masuk IAIN misalnya, hanya melalui testing yang diadakan mereka sendiri, sedangkan masuk perguruan tinggi bergengsi tersebut harus melalui ujian SPMB yang amat berat. Dengan perubahan IAIN menjadi UIN, maka di samping melalui ujian lokal, masuk UIN juga melalui ujian SPMB.

Ketiga, tahap pematangan gagasan dan implementasi. Tahap ini terjadi pada zaman Azyumardi Azra sebagai rektor. Pada tahap ini proposal yang memuat gagasan dan pemikiran perubahan IAIN menjadi UIN yang telah dibuat di zaman sebelumnya disempurnakan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Melalui tim penyusun proposal yang solid dan bekerja keras, akhirnya proposal tersebut dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Proposal tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan rapat senat lengkap untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan. Selanjutnya proposal tersebut disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional setelah mengoordinasikannya dengan Menteri Agama, khususnya dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (Bagais) Departemen Agama RI. Sambil menunggu keluarnya keputusan perubahan tersebut, Azyumardi Azra selaku rektor memperkenalkan konsep IAIN dengan mandat yang lebih luas. Dengan mandat ini, maka di samping menyelenggarakan program studi agama seperti yang telah ada sebelumnya, IAIN juga menyelenggarakan program studi umum, seperti program studi agribisnis, teknik informatika, manajemen akuntansi, ekonomi dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu, upaya perubahan IAIN menjadi UIN terus berlangsung. Pada tahap ini dilakukan audiensi dengan berbagai pihak terkait, seperti dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Negara, Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara, dan lain-lain. Ganjalan terjadi ketika pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dijumpai ketentuan bahwa perguruan tinggi yang berada di bawah departemen non-kependidikan (Diknas), hanya dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi sampai dengan bentuk institut. Sedangkan untuk perguruan tinggi setingkat universitas harus berada di bawah naungan Diknas. Keadaan ini menimbulkan pro kontra, tentang apakah dengan perubahan IAIN menjadi UIN tersebut pengelolaannya berpindah dari Departemen Agama kepada Departemen Pendidikan Nasional, ataukah tetap berada di bawah pengelolaan Departemen Agama, mengingat sejarah lahirnya IAIN adalah karena peranan Departemen Agama. Upaya tarik menarik ini akhirnya dapat diselesaikan melalui kompromi dalam bentuk dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama RI dengan Menteri Pendidikan Nasional. Di dalam SKB tersebut dinyatakan bahwa secara kelembagaan, keuangan, kepegawaian dan pembukaan program studi agama IAIN berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama, sedangkan dari segi pengembangan akademik khususnya bidang studi umum, berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. Dengan SKB tersebut, maka tahapan perubahan IAIN menjadi UIN selanjutnya dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia. Setelah melalui upaya meyakinkan pihak-pihak terkait, khususnya Presiden melalui Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional, maka pada tanggal 20 Mei Tahun 2002 keluarlah Keputusan Presiden tentang perubahan tersebut melalui Kepres Nomor 031 Tanggal 30 Mei Tahun 2002. Dengan Kepres tersebut maka resmiah perubahan IAIN menjadi UIN.

- 2) Pengembangan fakultas dan program studi. Seiring dengan perubahan IAIN menjadi UIN, maka terjadi pula pengembangan pada fakultas-fakultas dan program studi. Penambahan fakultas-fakultas dan program studi tersebut terjadi bukan hanya pada penambahan fakultas dan program studi umum, melainkan juga penambahan pada program studi agama pada fakultas-fakultas agama sebelumnya. Dengan adanya penambahan fakultas dan program studi tersebut, maka para tamatan Madrasah Aliyah dan juga tamatan Sekolah Menengah Umum dapat melanjutkan studinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seluruh fakultas dan program studi tersebut telah mendapatkan izin dan pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama

dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan kata lain, seluruh fakultas dan program studi tersebut secara hukum telah sah dan memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan aktivitasnya.

- 3) Pengembangan sarana dan prasarana. Sejalan dengan adanya perubahan dan pengembangan fakultas dan program studi sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat perubahan dan pengembangan pada sarana dan prasarana. Pada masa sebelumnya, kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkesan sumpek, kumuh dan tidak tertib. Yang ada sebelumnya adalah gedung-gedung tua tahun 50-an yang sudah rusak dan tidak layak pakai. Jika datang musim hujan, banyak gedung yang tergenang air (kebanjiran), tumpukan sampah terdapat di mana-mana, serta taman yang tidak terawat. Namun di zaman Azyumardi Azra, 95 % gedung-gedung lama dipugar dan diganti dengan gedung-gedung baru dengan ketinggian antara tiga sampai tujuh lantai yang dilengkapi lift. Gedung-gedung tersebut didesain dengan memadukan keunggulan teknologi canggih, keislaman dan keindonesiaan. Dari segi fungsinya, gedung-gedung tersebut terdiri dari Gedung Rektorat, Auditorium Utama, Auditorium Madya, Gedung Kuliah, Student Center, Pusat Bahasa dan Budaya, University Club, Komersial Center, Wisma Usaha, Gedung Perkantoran Kopertais, Asrama Mahasiswa dan Mess Karyawan.

Gedung-gedung tersebut juga dilengkapi dengan jalan lingkar yang memudahkan melakukan interaksi dengan unit-unit yang ada, penataan yang tertib, serta taman-taman yang dilengkapi dengan pohon pelindung dan pohon hias yang tertata rapi dan indah. Berbagai tamu baik dari dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke kampus ini, selalu mengatakan bahwa kampus ini sangat megah, indah, bersih, tertib dan asri.

- 4) Perubahan dan pengembangan pusat-pusat studi dan kerja sama. Seiring dengan terjadinya perubahan pada berbagai aspek sebagaimana tersebut di atas, terjadi juga pengembangan pada pusat-pusat studi baik kualitas maupun kuantitasnya. Kebijakan pengembangan pusat-pusat studi tersebut didasarkan pada pemikiran tentang perlunya menciptakan kesejahteraan bagi sivitas akademika. Dalam berbagai kesempatan pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta senantiasa melakukan hubungan dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar. Hasil hubungan tersebut direalisasikan secara konkret. Realisasi ini antara lain dilakukan oleh pusat-pusat studi yang jumlahnya lebih dari tiga puluh buah. Keberadaan pusat-pusat studi tersebut adalah sebagai penyangga dari berbagai program kerja sama yang dilakukan UIN dengan lembaga-lembaga lain.
- 5) Peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan. Upaya peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan ini antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan dan belanja pegawai yang bersumber dari berbagai sektor yang memungkinkan, baik dari pemerintah dan non-pemerintah, termasuk dari masyarakat dan usaha sendiri. Sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah antara lain dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersifat rutin berupa DIK (Daftar Isian Kegiatan), maupun non-kegiatan berupa DIP (Daftar Isian Proyek), dan dana yang bersumber dari masyarakat berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan dana lainnya sesuai ketentuan. Sedangkan dana lainnya yang diupayakan melalui usaha sendiri baik dalam bidang jasa maupun non-jasa. Bidang jasa dilakukan antara lain dengan memberikan pelayanan bidang pelatihan, pendidikan, penelitian, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan bidang non-jasa atau usaha antara lain dilakukan melalui peningkatan usaha koperasi secara lebih luas serta usaha oleh Dharma Wanita.

Dengan berbagai upaya tersebut, maka tingkat kesejahteraan dosen dan karyawan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan di mana sebagian besar dari dosen dan karyawan telah memiliki rumah dan kendaraan sendiri, dapat menyekolahkan anak-anaknya, dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan lain sebagainya.

Di bagian metode jelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan untuk : (1) memungkinkan pembaca mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan dan (2) mengizinkan orang lain untuk mereplikasi penelitian anda. Anda harus menggambarkan dengan tepat apa yang anda lakukan, apa dan bagaimana eksprimen dijalankan, apa, berapa banyak, seberapa sering, dimana, kapan dan mengapa peralatan dan bahan digunakan. Pertimbangan utama adalah memastikan bahwa detail yang disediakan untuk memverifikasi temuan anda dan memungkinkan replikasi penelitian.

Kesimpulan

Azyumardi Azra –biasa dipanggil Azra, adalah seorang tokoh pembaru pendidikan Islam dan cendekiawan Muslim Indonesia yang cukup berpengaruh di Indonesia. Selain itu, ia juga seorang aktivis, yang tidak hanya asyik dengan pemikiran-pemikiran yang rumit yang seolah tidak ada hubungannya dengan realitas. Sebagai cendekiawan, ia berlibat dengan realitas kebijakan yang rigid dan birokrasi yang berbelit-belit, yang tidak bisa ditangani dengan konsep dan wacana serba abstrak, rumit dan teoritis. Karena itu – meminjam kerangka Antonio Gramsci- ia lebih pas dipandang sebagai ‘intelektual organik’.

Selanjutnya, terkait dengan pembaruan pemikiran pendidikan Islam Azyumardi Azra, yakni, pertama, modernisasi pendidikan Islam yang dihubungkan dengan tantangan abad ke-21 dan era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan modernisasi pendidikan Islam yang digagas Azra ini adalah modernisasi yang didasarkan pada ajaran Islam yang pada prinsipnya sangat modern, yaitu bagaimana suatu pengetahuan bukan hanya untuk diketahui dan dikembangkan, melainkan sekaligus untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Kedua, demokratisasi pendidikan Islam, yakni proses menuju demokrasi di dalam pendidikan Islam. Dalam pandangan Azra, demokratisasi pendidikan Islam bertujuan akhir pembentukan masyarakat Indonesia yang demokrasi, bersih, kritis, bermoral, dan berakhlak serta berpegang teguh pada nilai keadaban.

Di samping pembaru pemikiran, Azyumardi Azra pun seorang aktivis atau praktisi pembaru kelembagaan pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan yang telah dicapai selama menjadi rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada masa kepemimpinannya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencapai tingkat kemajuan yang belum dicapai pada zaman sebelumnya. Kemajuan meliputi perubahan IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penambahan jumlah fakultas dan program studi, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan pusat-pusat studi dan kerja sama serta peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan.

References

- Arif, M. (2008). *Pendidikan Islam Transformatif*. LKIS Pelangi Aksara.
- Azra, A. (1999a). *Esei-esei intelektual Muslim dan pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (1999b). *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A., & Thaha, I. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kerja sama UIN Jakarta Press [dan] Kencana.
- Basri, H. (2013). *Filsafat Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dwifatma, A. (2011). *Cerita Azra: Biografi Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra*. Erlangga.
- Faisal, A., & Jusuf, R. P. I. (1995). *Reorientasi Pemikiran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gunawan, H. (2014). *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- H Abuddin Nata, M. A. (2012). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Indonesia, K. B. B. (1990). *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- ISTANTO, I. (2009). *PEMIKIRAN PROF. DR. AZYUMARDI AZRA TENTANG DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM*. Universitas Muhammadiyah surakarta.
- Jalaluddin, T. P. (2003). *Cet. III*; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, M., & Priatna, T. (2005). *Pemikiran Pendidikan Islam (Vol. 1)*. Sahifa.
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam: di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. RajaGrafindo Persada.
- Nata, A., & Nasuhi, H. (2002). *Membangun pusat keunggulan studi Islam: sejarah dan profil pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1957-2002*. IAIN Jakarta Press.
- Prasojo, S. (1974). *Profil pesantren: laporan hasil penelitian al-Falak & delapan pesantren lain di Bogor*. LP3ES.

- Rahmat, J. (1986). *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di kampus*. Mizan.
- Sirozi, M. (2004). *Agenda strategis pendidikan Islam*. AK Group.
- Sudirman, N. (n.d.). dkk. 1992. *Ilmu Pendidikan*.
- Suyanto. (2000). *Refleksi dan reformasi pendidikan di Indonesia memasuki milenium III*. Adicita.
- .